SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 143 TAHUN 2018

TENTANG TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TAHUNAN KOTA PROBOLINGGO

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TAHUNAN KOTA PROBOLINGGO

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PENANGGUNG-JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
			NOV: 3 4 | DES (n-1): 1 2 3 4 | JAN: 1 2 3 4 | FEB: 1 2 3 4 | MAR: 1 2 3 4 | APRL: 1 2 3 4 | MEI: 1 2 3 4 | JUN: 1 2 3 4 | JUL: 1 2 3 4 | AGST: 1 2 3 4 | SEP: 1 2 3 4 | OKT: 1 2 3 4 | NOV: 1 2 3 4 | DES: 1 2 3 4	
A	**PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH**			
A.1	**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**			
1	**Persiapan Penyusunan RKPD**			
	1.1 Pembentukan Tim Penyusun RKPD	Bappeda Litbang		Dalam Bentuk Keputusan Walikota (ps. 73)
	1.2 Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD	Bappeda Litbang		
	1.3 Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Bappeda Litbang		Mengacu pada SIPD (ps. 73)
2	**Penyusunan Rancangan Awal RKPD**			
	2.1 Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Bappeda Litbang		Berpedoman pada RPJMD, Rancangan Awal RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional, Pedoman penyusunan RKPD (penyelarasan sasaran, prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan kabupaten / kota dengan provinsi) (ps. 77-79)
	2.2 Penyampaian Rancangan Awal Renja PD	Perangkat Daerah		Sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Awal RKPD
	2.3 Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD	DPRD		Berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat, disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bappeda Litbang (ps. 78 ayat 3). Disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.
	2.4 Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD	Bappeda Litbang		Melibatkan Kepala Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, ditujukan untuk menghimpun masukan dan saran penyempurnaan, dilengkapi berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda Litbang dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat (ps. 80)
	2.5 Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD	Bappeda Litbang		
	2.6 Pengajuan Persetujuan Rancangan Awal RKPD	Bappeda Litbang / Sekretaris Daerah		Diajukkan oleh Kepala Bappeda Litbang kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD (ps.82)
	2.7 Penyampaian Surat Edaran Pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	Bappeda Litbang		Surat Edaran Kepala Daerah kepada Perangkat Daerah, dilampiri sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan PD disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD (ps. 83)
	2.8 Penyampaian Rancangan Awal Renja PD untuk Verifikasi	Perangkat Daerah		Dari Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda Litbang (ps. 84dan ps. 133)
	2.9 Verifikasi Rancangan Awal Renja PD	Bappeda Litbang		Ditujukan untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja PD dengan RKPD (ps. 84)
3	**Penyusunan Rancangan RKPD**			
	3.1 Penyampaian Hasil Penyempurnaan Rancangan Renja PD	Perangkat Daerah		Disampaikan kepada Kepala Bappeda Litbang sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD (ps. 133)

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PENANGGUNG-JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN																																																						KETERANGAN
			NOV		DES (n-1)				JAN				FEB				MAR				APRL				MEI				JUN				JUL				AGST				SEP				OKT				NOV				DES				
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	3.2 Penyusunan Rancangan RKPD	Bappeda Litbang																																																						Disusun berdasarkan rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi serta hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional (ps. 88)
	3.3 Pengajuan Persetujuan Rancangan RKPD	Bappeda Litbang / Sekretaris Daerah																																																						Diajukkan oleh Kepala Bappeda Litbang kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, ditujukan juga dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD (ps.89)
4	**Pelaksanaan Musrenbang**																																																							
	4.1 Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Musrenbang	Bappeda Litbang, Kelurahan, Kecamatan																																																						
	4.2 Musrenbang RKPD Kelurahan	Kelurahan																																																						
	4.3 Musrenbang RKPD Kecamatan	Kecamatan																																																						Merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan kelurahan di lingkup kecamatan, ditujukan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah wilayah Kecamatan. Dilengkapi berita acara kesepakatan dan ditandatangani perwakilan pemangku kepentingan yang hadir (ps. 98)
	4.4 Musrenbang RKPD Kota	Bappeda Litbang																																																						Ditujukan untuk menyepakati permasalahan, prioritas pembangunan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator, target kinerja, lokasi, penyelarasan dengan prioritas provinsi, sinkronisasi dan klarifikasi usulan program dan kegiatan kelurahan hasil musrenbang kecamatan. Dilengkapi berita acara kesepakatan dan ditandatangani perwakilan pemangku kepentingan yang hadir (ps. 94-95)
5	**Perumusan Rancangan Akhir**																																																							
	5.1 Penyempurnaan Rancangan RKPD	Bappeda Litbang																																																						Didasarkan berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD Kota (ps. 100)
	5.2 Penyampaian & Permohonan Pembahasan Rancangan Akhir RKPD kepada Sekretaris Daerah	Bappeda Litbang																																																						Disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan Kepala Perangkat Daerah.
	5.3 Pembahasan Rancangan Akhir RKPD	Bappeda Litbang / Perangkat Daerah																																																						Ditujukan untuk memastikan program dan kegiatan PD telah diakomodir dalam RKPD. Paling Lambat 1 Minggu setelah Musrenbang RKPD (ps. 101)
	5.4 Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD	Bappeda Litbang																																																						(ps. 101 ayat 4)
	5.5 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD	Bappeda Litbang																																																						
	5.6 Penyampaian Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir & Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada Gubernur	Bappeda Litbang																																																							Dilengkapi Surat Permohonan Fasilitasi, Rancangan Akhir, Berita Acara Kesepakatan Musrenbang, Hasil Pengendalian & Evaluasi Perencanaan Pembangunan Tahunan, Gambaran Konsistensi Program dan Pendanaan RPJMD dan RKPD. Fasilitasi dilakukan paling lama 15 hari sejak dokumen diterima secara lengkap (ps. 102). Kelengkapan dokumen untuk fasilitasi mengacu pada ps. 102 ayat 4, terintegrasi dengan tahapan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan (jadwal poin C.1.1)
	5.7 Fasilitasi Rancangan Akhir & Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD Kota	Provinsi Jawa Timur																																																						
	5.9 Penyempurnaan Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD	Bappeda Litbang																																																						Berdasarkan Rekomendasi hasil Fasilitasi Gubernur (ps. 102)
6	**Penetapan**																																																							

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PENANGGUNG-JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN NOV (3, 4) · DES (n-1) (1, 2, 3, 4) · JAN · FEB · MAR · APRL · MEI · JUN · JUL · AGST · SEP · OKT · NOV · DES (1, 2, 3, 4)	KETERANGAN
6.1	Penyampaian Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada Sekretaris Daerah untuk permohonan persetujuan penetapan dan pengundangan	Bagian Hukum / Bappeda Litbang / Sekretaris Daerah		Paling Lambat 2 Minggu setelah Fasilitasi rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD oleh Gubernur (ps. 103)
6.2	Penetapan Peraturan Walikota tentang RKPD	Bappeda Litbang / Bagian Hukum		Paling Lambat 1 Minggu setelah Penetapan RKPD Provinsi Jawa Timur (ps. 104)
6.3	Penyampaian Peraturan Walikota tentang RKPD kepada Gubernur	Bappeda Litbang / Bagian Hukum		Paling Lambat 1 Minggu setelah ditetapkan (ps. 107)
A.2	**Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah**			
1.	**Persiapan Penyusunan**			
1.1	Pembentukan Tim Penyusun Renja PD	Perangkat Daerah		Dalam bentuk keputusan Kepala Daerah (ps. 125)
1.2	Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renja PD	Perangkat Daerah		
1.3	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Perangkat Daerah		Mengacu pada SIPD (ps. 125)
2	**Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah**			
2.1	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD	Perangkat Daerah		Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dan tahun berjalan (ps. 126). Sistematika mengacu ps. 129
2.2	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD	Perangkat Daerah		Disampaikan kepada Bappeda Litbang guna diintegrasikan dalam Rancangan Awal RKPD
2.3	Penyampaian Surat Edaran Pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD	Bappeda Litbang		Surat Edaran Kepala Daerah kepada Perangkat Daerah, dilampiri sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan PD disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD (ps. 83)
2.4	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD	Perangkat Daerah		Mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran, berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD (ps. 130)
2.5	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah / Bappeda Litbang		Melibatkan Pemangku Kepentingan, ditujukan untuk menghimpun masukan dan saran perbaikan Rancangan Awal Renja PD (ps. 84). Diintegrasikan dengan penyampaian Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda Litbang (ps. 130)
2.6	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD	Perangkat Daerah		
3	**Penyusunan Rancangan**			
3.1	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD untuk Verifikasi	Perangkat Daerah		Dari Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda Litbang (ps. 84dan ps. 133)
3.2	Verifikasi Rancangan Awal Renja PD oleh Bappeda Litbang	Bappeda Litbang		Ditujukan untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja PD dengan Rancangan Awal RKPD (ps.84 dan 134).
3.3	Penyampaian Saran dan Rekomendasi Penyempurnaan Renja PD	Bappeda Litbang		Paling Lambat 2 Minggu setelah Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bappeda Litbang (ps. 135)
3.4	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD menjadi Rancangan Renja PD	Perangkat Daerah		
3.5	Penyampaian Hasil Penyempurnaan Rancangan Renja PD	Perangkat Daerah		Disampaikan kepada Kepala Bappeda Litbang sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD (ps. 133)
4	**Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas**			

NO		TAHAPAN KEGIATAN	PENANGGUNG-JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN (NOV 3 4, DES (n-1) 1 2 3 4, JAN 1 2 3 4, FEB 1 2 3 4, MAR 1 2 3 4, APRL 1 2 3 4, MEI 1 2 3 4, JUN 1 2 3 4, JUL 1 2 3 4, AGST 1 2 3 4, SEP 1 2 3 4, OKT 1 2 3 4, NOV 1 2 3 4, DES 1 2 3 4)	KETERANGAN
	4.1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah (terintegrasi pada Tahapan Penyusunan Rancangan Awal Renja PD)	Perangkat Daerah / Bappeda Litbang		Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan berkoordinasi dengan Bappeda Litbang, dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Ditujukan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah, dilengkapi dengan berita acara kesepakatan yang ditandatangani pemangku kepentingan yang hadir (ps. 136)
5		**Perumusan Rancangan Akhir**			
	5.1	Penyempurnaan Rancangan Renja PD menjadi Rancangan Akhir Renja PD	Perangkat Daerah		Ditujukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang RKPD (ps. 138)
6		**Penetapan**			
	6.1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja PD kepada Kepala Bappeda Litbang	Perangkat Daerah		Paling Lambat 1 Minggu setelah Peraturan Walikota tentang RKPD ditetapkan (ps. 139)
	6.2	Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD	Bappeda Litbang		Ditujukan untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Walikota tentang RKPD dan Renja PD lainnya (ps. 140)
	6.3	Penyampaian Saran dan Rekomendasi Penyempurnaan Renja PD	Bappeda Litbang		
	6.4	Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja PD	Perangkat Daerah		Paling Lambat 2 Minggu setelah penyampaian Rancangan Akhir Renja PD (ps. 141)
	6.5	Penyampaian hasil Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja PD	Perangkat Daerah		Disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda Litbang (ps. 140)
	6.6	Penyampaian seluruh Renja PD untuk Penetapan Peraturan Walikota tentang Renja PD	Bappeda Litbang		Disampaikan oleh Bappeda Litbang kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
	6.7	Penetapan Peraturan Walikota tentang Renja PD	Bagian Hukum		Paling Lambat 1 Bulan sejak Penetapan Peraturan Walikota tentng RKPD
B		**PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH**			
B.1		**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**			
1.		**Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD**			
	1.1	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	Bappeda Litbang		Disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan (ps. 346). Muatan substansi mengacu ps. 348. Sistematika dan muatan substansi mengacu pada ps. 349
	1.2	Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD	DPRD		Didasarkan pada hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat, ditujukan sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Disampaikan dalam aplikasi e-planning dan/atau secara tertulis dalam rapat dengar pendapat dengan Walikota (ps. 348).
	1.3	Penyampaian Rancangan Perubahan RKPD untuk memperoleh persetujuan Walikota	Bappeda Litbang		Disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah (ps. 351)

NO		TAHAPAN KEGIATAN	PENANGGUNG-JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
	1.4	Penyampaian Surat Edaran Walikota tentang pedoman penyusunan perubahan Renja PD	Bappeda Litbang		Ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah, dilampiri dengan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh Persetujuan Walikota (ps. 351-352)
	1.5	Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja PD	Perangkat Daerah		Berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD (ps. 352 ayat 2)
	1.6	Penyampaian Rancangan Perubahan Renja PD	Perangkat Daerah		Disampaikan kepada Kepala Bappeda Litbang untuk diverifikasi (ps. 352 ayat 3)
	1.7	Verifikasi Rancangan Perubahan Renja PD	Bappeda Litbang		Ditujukan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja PD telah sesuai dengan Rancangan RKPD (ps. 352 ayat 4)
	1.8	Penyampaian Saran dan Rekomendasi Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja PD	Bappeda Litbang		
	1.9	Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja PD	Perangkat Daerah		
	1.10	Penyampaian Hasil Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja PD	Perangkat Daerah		Disampaikan kepada Kepala Bappeda Litbang paling lambat 5 hari setelah verifikasi (ps. 132 ayat 7)
2.	**Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD**				
	2.1	Penyempurnaan Rancangan Perubahan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD	Bappeda Litbang		Mengacu pada penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat berdasarkan hasil verifikasi (ps. 353)
	2.2	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD	Bappeda Litbang		
	2.3	Permohonan fasilitasi dan penyampaian Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda	Bappeda Litbang		ps. 254 ayat 2
	2.4	Penyampaian hasil Fasilitasi Provinsi	Provinsi Jawa Timur		Dalam bentuk surat Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi (ps. 354 ayat 4)
	2.5	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD	Bappeda Litbang		
3.	**Penetapan Perubahan RKPD**				
	3.1	Penyampaian Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah	Bappeda Litbang		Ditujukan guna memperoleh persetujuan untuk penetapan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD (ps. 355)
	3.2	Penetapan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD	Bagian Hukum		ps. 355 ayat 2
	3.3	Penyampaian Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur	Bappeda Litbang		Disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi (ps. 358)
B.2	**Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah**				
1.	**Penyusunan Rancangan Perubahan Renja PD**				
	1.1	Penyampaian Surat Edaran Walikota tentang pedoman penyusunan perubahan Renja PD	Perangkat Daerah		
	1.2	Penyusunan Rancangan Perubahan Renja PD	Perangkat Daerah		Disusun dengan berpedoman kepada Rancangan Perubahan RKPD serta Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan (ps. 360). Substansi dan Sistematika Perubahan Renja PD mengacu pada ps. 361
	1.3	Penyampaian Rancangan Perubahan Renja PD kepada Kepala Bappeda Litbang untuk diverifikasi	Perangkat Daerah		Paling Lambat 1 minggu setelah Penyampaian Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja PD
	1.4	Verifikasi Rancangan Perubahan Renja PD	Bappeda Litbang		Ditujukan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja PD telah sesuai dengan Rancangan RKPD (ps. 352 ayat 4)

NO		TAHAPAN KEGIATAN	PENANGGUNG-JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN (NOV, DES (n-1), JAN, FEB, MAR, APRL, MEI, JUN, JUL, AGST, SEP, OKT, NOV, DES)	KETERANGAN
	1.2	Penyampaian hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD (Rancangan Akhir RKPD) kepada Gubernur	Bappeda Litbang		Disampaikan melalui Surat Walikota, diajukan bersamaan pada saat penyampaian Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD untuk dievaluasi (Lampiran Permendagri E.7.3)
	1.3	Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Akhir & Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD Kota	Provinsi Jawa Timur		Ditujukan untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD Kota telah berpedoman pada RPJMD Kota dan Mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP (Lampiran Permendagri E.7.3)
	1.4	Penyampaian Rekomendasi Gubernur terhadap Penyempurnaan Rancangan Akhir & Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD	Provinsi Jawa Timur		
	1.5	Penyempurnaan Kebijakan RKPD berdasarkan Rekomendasi Gubernur	Bappeda Litbang		Paling Lama 1 Minggu sejak Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD diterima
C.1.2		**Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah**			
1.		**Pemantauan dan Supervisi Penyusunan Rancangan Renja PD (terintegrasi dengan Tahapan Penetapan Renja PD)**			
	1.1	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Kepala Bappeda Litbang	Perangkat Daerah		
	1.2	Verifikasi Rancangan Renja PD	Bappeda Litbang		Ditujukan untuk memastikan bahwa Rancangan Renja PD telah disusun sesuai dengan RKPD (Mengacu pada Format E.70 Lampiran Permendagri)
	1.3	Pengajuan Rancangan Akhir Renja PD yang telah diverifikasi kepada Walikota untuk Pengesahan	Bappeda Litbang		Mengacu pada Formulir E.71 Lampiran Permendagri
	1.4	Penyampaian Rekomendasi Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja PD dari Walikota kepada Kepala PD	Bappeda Litbang / Walikota		
	1.5	Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Walikota untuk Penyempurnaan Renja PD	Perangkat Daerah		Paling Lama 1 minggu sejak verfikasi
C.2		**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah**			
C.2.1		**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (terintegrasi dengan Tahapan Penyusunan Rancangan KUA, PPAS dan APBD)**			
1.		Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD (Tahun n+1)	Bappeda Litbang		Mengacu pada Formulir E.35 dan E.76 Lampiran Permendagri E.8.3.2. Ditujukan untuk menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatof yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan Rancangan KUA, PPAS dan APBD Kota (ps. 294)
2.		Penyempurnaan Rancangan KUA PPAS, dan APBD berdasarkan hasil Pengendalian dan Evaluasi	Bappeda Litbang / BPPKAD		Lampiran Permendagri E.8.3.2
3.		Penyampaian hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD kepada Walikota	Bappeda Litbang		ps. 295
C.2.2		**Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (terintegrasi dengan Tahapan Penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran))**			
1.		Penyusunan RKA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PENANGGUNG-JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN (NOV 3 4; DES (n-1) 1 2 3 4; JAN 1 2 3 4; FEB 1 2 3 4; MAR 1 2 3 4; APRL 1 2 3 4; MEI 1 2 3 4; JUN 1 2 3 4; JUL 1 2 3 4; AGST 1 2 3 4; SEP 1 2 3 4; OKT 1 2 3 4; NOV 1 2 3 4; DES 1 2 3 4)	KETERANGAN
2.	Penyusunan Formulir Pengendalian dan Evaluasi Renja PD (tahun n+1)	Perangkat Daerah		Mengacu pada ps. 290-292 dan Formulir E.75 Lampiran Permendagri, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan Indikator Kinerja serta kelompok sasaran
3.	Penyampaian Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi dari Kepala OPD kepada Walikota melalui Kepala Bappeda Litbang	Perangkat Daerah		ps. 292
4.	Evaluasi terhadap Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja PD	Bappeda Litbang		ps. 293
5.	Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan Rancangan RKA Perangkat Daerah	Bappeda Litbang		Walikota melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah (ps. 293), sebagai tindak lanjut hasil pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Renja PD
6.	Penyempurnaan Rancangan RKA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		
7.	Penyampaian hasil penyempurnaan Rancangan RKA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		Disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda Litbang (ps. 293)
C.3	**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah**			
C.3.1	**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**			
1.	Penyusunan Laporan Evaluasi terhadap RKPD	Bappeda Litbang		Dilaksanakan untuk pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya (n-2) dan Tahun Berjalan (n-1), Ditujukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai. Dilaksanakan setiap Triwulan dengan menggunakan hasil Evaluasi Renja PD (ps. 305). Mengacu pada Formulir E.60 Lampiran Permendagri
2.	Penyampaian hasil pengendalian dan evauasi terhadap RKPD kepada Walikota	Bappeda Litbang		
3.	Penyampaian hasil pengendalian dan evauasi terhadap RKPD Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi	Bappeda Litbang		Disampaikan oleh Walikota kepada Gubernur (ps. 306)
4.	Penyampaian Hasil Evaluasi Gubernur kepada Walikota	Provinsi Jawa Timur		Formulir E.61 Lampiran Permendagri, paling lambat 2 bulan setelah konsultasi (Lampiran Permendagri E.9.3)
5.	Penyempurnaan berdasarkan Hasil Rekomendasi Gubernur	Bappeda Litbang		
C.3.2	**Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah**			
1.	Penyusunan Laporan Evaluasi terhadap Hasil Renja PD Tahun Sebelumnya (n-1)	Perangkat Daerah		Dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda, dilaksanakan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah, dan digunakan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja PD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah dan prioritas pembangunan tahunan , disajikan dalam bentuk laporan triwulan (mengacu pada ps. 302-303 dan Formulir E.81 Lampiran Permendagri)
2.	Penyampaian Rekomendasi Langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindalanjuti Kepala Perangkat	Bappeda Litbang		Hasil evaluasi Renja PD dijadikan bahan penyusunan Renja PD Tahun Berikutnya (ps. 303)
3.	Penyampaian hasil tindak lanjut perbaikan / penyempurnaan terhadap Rekomendasi Evaluasi Renja PD Tahun Sebelumnya	Perangkat Daerah		Disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda (ps. 303)
4.	Penyusunan Laporan Evaluasi terhadap Hasil Renja PD Tahun Berjalan (n)	Perangkat Daerah		

NO		TAHAPAN KEGIATAN	PENANGGUNG-JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
				NOV (3, 4) · DES (n-1) · JAN · FEB · MAR · APRL · MEI · JUN · JUL · AGST · SEP · OKT · NOV · DES (1, 2, 3, 4)	
	1.5	Penyampaian Saran dan Rekomendasi Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja PD	Bappeda Litbang		
	1.6	Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja PD	Perangkat Daerah		
	1.7	Penyampaian Hasil Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja PD	Perangkat Daerah		Disampaikan kepada Kepala Bappeda Litbang paling lambat 5 hari setelah verifikasi (ps. 132 ayat 7)
2.	**Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD**				
	2.1	Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD	Perangkat Daerah		Disusun dari Rancangan Perubahan Renja PD yang disesuaikan dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD, diselesaikan paling lambat 2 minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan (ps. 363)
	2.2	Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Renja PD untuk diverifikasi	Perangkat Daerah		Disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda Litbang, disampaikan paling lambat 2 minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan (ps. 364)
	2.3	Verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renja PD	Bappeda Litbang		Ditujukan untuk untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja PD telah selaras dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD (ps. 365). Paling Lambat 3 minggu setelah penetapan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD (ps. 366)
	2.4	Penyampaian Saran dan Rekomendasi Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD	Bappeda Litbang		Ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD
	2.5	Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD	Perangkat Daerah		
	2.6	Penyampaian hasil Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD	Perangkat Daerah		Disampaikan kepada Kepala Bappeda Litbang (ps. 365)
3.	**Penetapan Perubahan Renja PD**				
	3.1	Penyampaian seluruh Rancangan Akhir Perubahan Renja PD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan	Bappeda Litbang		
	3.2	Penetapan Perubahan Renja PD melalui Peraturan Walikota	Bappeda Litbang / Bagian Hukum		Paling Lambat 1 Bulan setelah Penetapan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD (ps. 367)
C	**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**				
C.1	**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah**				
C.1.1	***Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)***				
1.	**Pemantauan dan Supervisi Penyusunan Rancangan RKPD (terintegrasi dengan Tahapan Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan RKPD)**				
	1.1	Penyampaian hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD (Rancangan Akhir RKPD) kepada Walikota	Bappeda Litbang		Mengacu pada Format E.35 Lampiran Permendagri

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PENANGGUNG-JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN																																																			KETERANGAN
			NOV		DES (n-1)				JAN				FEB				MAR				APRL				MEI				JUN				JUL				AGST				SEP				OKT				NOV				DES				
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
5.	Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi terhadap Hasil Renja PD Tahun Berjalan (n)	Perangkat Daerah																			■	■											■	■											■	■							■	■			Dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda setiap Triwulan, dilaksanakan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan
D	PENYUSUNAN APBD																																																								
1	Penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Bappeda Litbang																											■	■	■	■																									Mengacu pada RKPD, muatan substansi mengacu pada Lampiran Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 (Bagian IV Teknis Penyusunan APBD, Point 5-6 Hal. 60-61)
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Bappeda Litbang kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD	Bappeda Litbang																														■																									
3	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	Bappeda Litbang / Sekretaris Daerah																															■																								
4	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Bappeda Litbang / Walikota																																■																							
5	Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	DPRD																																	■	■	■																				
6	Kesepakatan antara Walikota dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Bappeda Litbang / Walikota / DPRD																																			■																				Paling lama 4 minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS diterima oleh DPRD
7	Penerbitan Surat Edaran Walikota perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD	BPPKAD																																			■	■																		Pedoman Penyusunan RKA-SKPD ditujukan kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD ditujukan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Surat Edaran mencakup mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD, ASB dan standar harga regional (Lampiran Permendagri No 38 Th 2018 Hal 61 Point 7)
8	Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	BPPKAD																																			■	■																	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran / Perubahan APBD mengacu pada RKA-SKPD dan RKA-PPKD
9	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD	BPPKAD / Bagian Hukum																																							■																
10	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	DPRD																																								■	■	■	■	■											Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD antara Walikota dengan DPRD wajib mempedomani RKPD, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
11	Persetujuan bersama DPRD dan Walikota	BPPKAD / Bagian Hukum / Walikota / DPRD																																													■										Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan, mengacu pada ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 312 ayat 1. Dalam hal Walikota dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak disampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh Walikota kepada DPRD, Walikota menyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Gubernur (mengacu pada Pasal 312 dan 313 UU No. 23 Tahun 2014)
12	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	BPPKAD / Bagian Hukum																																													■										3 hari kerja setelah persetujuan bersama
13	Penyampaian Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD	Provinsi Jawa Timur																																														■	■								Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Waikota tentang Penjabaran APBD diterima oleh Gubernur

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PENANGGUNG-JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN																																																						KETERANGAN
			NOV		DES (n-1)				JAN				FEB				MAR				APRL				MEI				JUN				JUL				AGST				SEP				OKT				NOV				DES				
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
14	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	BPPKAD / DPRD																																																							Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
15	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Gubernur	BPPKAD / DPRD																																																							3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan
16	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	BPPKAD / Bagian Hukum																																																							
17	Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur	BPPKAD / Bagian Hukum																																																							Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan
E	**PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD**																																																							
1	Penyusunan Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan	Bappeda Litbang																																																						
2	Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan oleh Kepala Bappeda Litbang kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD	Bappeda Litbang																																																						
3	Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD kepada Walikota	Bappeda Litbang																																																						
4	Pembahasan Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan	DPRD																																																						
5	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan	Bappeda Litbang																																																						
6	Penerbitan Surat Edaran Walikota perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPPKAD																																																						
7	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD	BPPKAD / Bagian Hukum																																																						
8	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	DPRD																																																						
9	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Walikota	BPPKAD / Bagian Hukum / Walikota / DPRD																																																						Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir
10	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	BPPKAD																																																						Paling Lambat 3 hari kerja setelah persetujuan bersama
11	Penyampaian Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD	Provinsi Jawa Timur																																																						Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh Gubernur
12	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	BPPKAD / DPRD																																																						Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
13	Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Gubernur	BPPKAD / DPRD																																																						3 hari kerja setelah Keputusan pimpinan DPRD ditetapkan
14	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Bagian Hukum / BPPKAD																																																						

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PENANGGUNG-JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN																																																					KETERANGAN
			NOV		DES (n-1)				JAN				FEB				MAR				APRL				MEI				JUN				JUL				AGST				SEP				OKT				NOV				DES				
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
15	Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur	Bagian Hukum / BPPKAD																																									■												Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ditetapkan

KETERANGAN :

1. **Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (poin A-C) mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017**
2. **Penyusunan Anggaran (Poin D - E) mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana dirubah beberapa kali, terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011**

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I